BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian dilapangan tentang Efektivitas Pembinaan Pelaku Usaha Unit Pengolahan Ikan (UPI) dalam Rangka Persiapan Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) di Kota Padang bisa ditarik kesimpulan sudah dilakukan dengan maksimal. Tetapi, masih terdapat kendala dalam proses penerbitan SKP tersebut, baik dari sudut pandang Dinas atau pun dari sudut pandang UPI itu sendiri. Kesimpulan ini dibuat berdasarkan triangulasi data dan informasi yang diperoleh dari dokumen dan wawancara.

- a. Produksi, sudah terlaksana dengan baik. Pada tahap ini, pembinaan sudah terlaksana cukup baik dengan terbitnya dua surat rekomendasi SKP untuk UPI skala mikro yang direkomendasikan oleh DPP Kota Padang ke DKP Provinsi Sumbar. Dan pembinaan paling sedikit dilakukan satu kali dalam sebulan ke UPI yang ada di Kota Padang, dalam hal ini DPP Kota Padang sudah melakukan upaya yang maksimal dan bisa dikatakan sudah baik, walaupun masih banyak UPI yang belum mendapatkan surat rekomendasi SKP tersebut.
- b. Efisiensi, indikator finansial (anggaran) dikatakan sudah cukup baik, walaupun masih terdapat kekurangan anggaran untuk melakukan pembinaan secara rutin dan terus menerus yang ditargetkan dinas melakukan pembinaan 2-3 kali dalam

seminggu setiap minggu nya, namun hal itu masih belum tercapai karena anggaran yang masih belum memadai. Sedangkan indikator waktu disimpulkan sudah cukup baik dengan ketentuan waktu yang ditetapkan yaitu selama 60 hari mulai dari pengajuan SKP ke dinas hingga terbit nya SKP tersebut.

- c. Kepuasan, pada variabel kepuasan ini jumlah keluhan yang diterima dinas adalah 12 keluhan selama tahun 2023 terkait proses pembinaan dalam proses persiapan pengajuan SKP di DPP Kota Padang. Hal ini bisa dikatakan sebagai jumlah yang rendah, namun ini perlu diperhatikan agar tidak ada lagi keluhan yang berat dari UPI terhadap proses penerbitan SKP.
- d. Adaptasi, variabel adaptasi dengan indikator responsif dikatakan sudah cukup baik dilakukan oleh dinas, karena dinas sudah fleksibel dengan perkembangan zaman, ketika dinas atau upi membutuhkan ide dan memberikan keluhan hal itu bisa dilakukan melalui media sosial seperti whatsapp atau pun melalui telfon, sehingga tidak perlu langsung ke dinas untuk berkordinasi dalam waktu yang tidak ditentukan. Hal tersebut merupakan tindakan yang cukup baik yang dilakukan dinas dalam merespons masyarakat (UPI).
- e. Pengembangan, dalam proses penerbitan SKP ini ada 2 langkah secara garis besar yaitu pelatihan dan pembinaan. Dimana dalam kedua kegiatan tersebut dapat dikatakan cukup baik, karena pelatihan GMP dan pembinaan yang diberikan oleh DKP tersebut sangat bermanfaat bagi UPI dalam pemahaman dan persyaratan pengajuan SKP. Dan pembina mutu daerah ataupun provinsi

juga mendapatkan pelatihan GMP dan pelatihan peningkatan SDM bagi petugas pembina mutu.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Efektivitas Pembinaan Pelaku Usaha Unit Pengolahan Ikan (UPI) dalam Rangka Persiapan Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) di Kota Padang, maka peneliti memberikan saran yang objektif untuk proses penerbitan SKP ini, sebagai berikut :

1. Meningkatkan jumlah pembina mutu di setiap daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat agar proses penerbitan SKP lebih efektif dilakukan, seperti pembinaan yang biasanya hanya bisa dilakukan 2-3 kali sebulan, ketika adanya penambahan jumlah pembina mutu, pembinaan ke UPI tersebut bisa dilakukan 2-3 kali dalam setiap minggunya.
2. DKP Sumbar atau DPP Kota Padang bisa membantu UPI untuk mengajukan dana hibah atau bantuan teknis dari pusat atau daerah yang dikhususkan untuk sektor perikanan terutama proses penunjang penerbitan SKP.
3. DKP Sumbar dan DPP Kota Padang diharapkan lebih meningkatkan lagi pengawasan rutin terhadap UPI untuk memastikan bahwa UPI mematuhi dan mengikuti standar pengolahan yang sesuai dan berkelanjutan. Dan juga lebih rajin untuk mensosialisasikan dan meyakinkan kepada masyarakat pentingnya memiliki SKP bagi Pelaku Usaha UPI.